

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional merupakan salah satu kebijakan di Indonesia untuk mencapai tujuan yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat secara adil, makmur dan merata. Arah dari kebijakan pembangunan nasional ini adalah untuk mewujudkan pembangunan daerah yang merata di setiap wilayah. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih kreatif dan mandiri dalam mengelola keuangan daerahnya dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga akan memacu tumbuh kembangnya kemampuan ekonomi untuk melaksanakan pembangunan ekonomi daerah.

Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah, masyarakat dan pemerintah daerah harus bekerja sama dalam mengelola potensi wilayahnya, sehingga tujuan untuk menciptakan jenis lapangan kerja yang baru dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi wilayah dapat tercapai. Masyarakat dan pemerintah daerah juga harus mampu mengidentifikasi potensi dari setiap sumber daya yang dibutuhkan untuk dijadikan rancangan pembangunan perekonomian kedepannya. Kemandirian daerah akan tercipta jika pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah berjalan dengan baik dan didukung oleh program pemerintah yang jelas.

Pemerintah mengeluarkan salah satu program dalam kebijakan pembangunan nasional yaitu berupa otonomi daerah. Otonomi daerah juga dapat memaksimalkan tujuan dari pembangunan daerah dengan memberikan kebebasan bagi pemerintah daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri. Adanya otonomi daerah, diharapkan bahwa pemerintah daerah dapat lebih memberikan pelayanan publik secara efektif dan efisien. Dikarenakan pemerintah daerah dapat lebih memahami masyarakatnya terkait apa yang mereka butuhkan.

Kebijakan otonomi daerah ini sudah berjalan secara efektif sejak tanggal 1 Januari 2001. Menurut UU Nomor 23 Tahun 2004, Otonomi daerah adalah wewenang masing-masing daerah untuk mengatur dan mengurus setiap kegiatan yang ada di wilayahnya berdasarkan aturan-aturan yang berlaku untuk mencapai tujuan utama dalam menciptakan kesejahteraan dengan meningkatkan perekonomian. Otonomi daerah sendiri menganut asas desentralisasi yang merupakan pemberian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk penciptaan kemandirian dan kreativitas daerah.

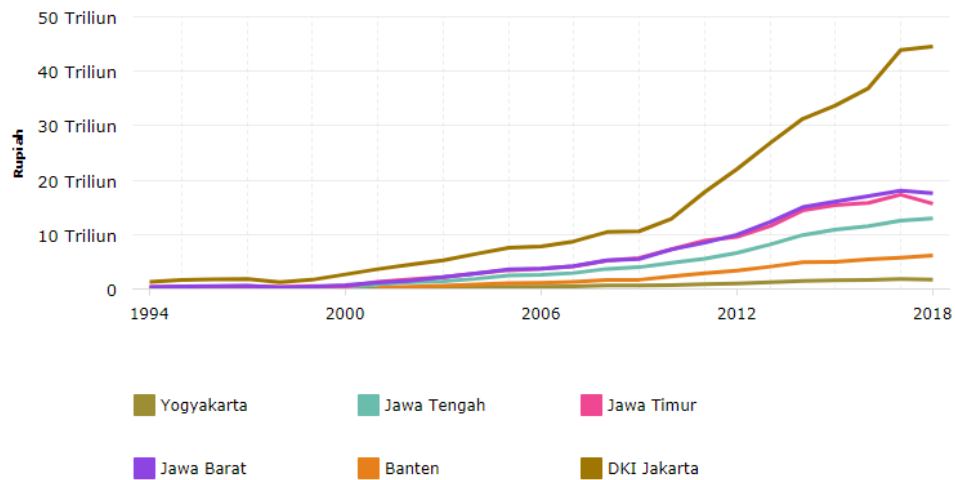
Demi terselenggaranya otonomi daerah secara optimal, maka telah ditetapkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 yang berisi tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Perimbangan keuangan ini dijadikan sebagai wujud dukungan pendanaan atas dilakukannya asas desentralisasi oleh pemerintah daerah. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Pasal 5, sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-lain.⁵ Sejalan dengan tujuan otonomi

daerah, maka suatu daerah harus mengoptimalkan besarnya Pendapatan Asli Daerahnya.

Otonomi Daerah berdampak pada semakin luasnya kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan. Pembangunan dapat berjalan lancar apabila sumber daya manusia berkualitas, dan tersedia sumber daya alam dan dana yang cukup. Namun demikian, tidak semua daerah mempunyai kesemuanya tersebut secara cukup, dan hal ini menjadi permasalahan di sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia. Pemerintah daerah dituntut lebih proaktif untuk menggali berbagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada terutama yang potensial, untuk mencukupi kebutuhan pembiayaan kegiatan pembangunan daerah (Mariyanto, 2015).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi indikator perwujudan penggalan sumber daya dan potensi suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah dari sumber ekonomi asli daerah. Adapun sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Mardiasmo, 2002).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi di Jawa dapat dideskripsikan pada gambar sebagai berikut:



Gambar 1.1
Pendapatan Asli Daerah 6 Provinsi di Jawa
Sumber: Kusnandar (2019)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pulau Jawa, terbesar adalah DKI Jakarta, diikuti oleh Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, dan paling rendah Daerah Istimewa Yogyakarta. Apabila melihat pada grafik terlihat bahwa PAD Jawa Tengah mulai menunjukkan peningkatan setelah tahun 2000.

Peningkatan PAD sangat menentukan pada penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini karena PAD yang semakin tinggi di suatu daerah, maka daerah tersebut menjadi mandiri dan berkurang ketergantungannya kepada pusat, sehingga kemampuan daerah tersebut tinggi untuk berotonomi. Jadi PAD menjadi salah satu modal dasar pemerintah daerah untuk mendapatkan dana pembangunan serta memenuhi belanja daerah (Mardiyanto, 2015).

Peningkatan PAD menjadi sebuah hal yang penting untuk dilakukan oleh setiap daerah agar tercapai kemandirian keuangan dalam rangka otonomi daerah. Peningkatan PAD akan berkontribusi terhadap realisasi APBD daerah.

Hal ini karena besarnya PAD menambah APBD di sisi pendapatan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, maka daerah perlu untuk terus berupaya meningkatkan PAD serta melakukan analisis mengenai faktor-faktor apa saja yang berpotensi untuk meningkatkan PAD. Hal ini juga harus dilakukan Provinsi Jawa Tengah. Agus (2018) menyatakan bahwa PAD Jateng masih tertinggal dari Provinsi lain seperti Jawa Barat dan Jawa Timur. Karena di provinsi tersebut segala sektor diupayakan demi mendapatkan keuntungan untuk mendongkrak PAD.

Banyak faktor yang dapat berpengaruh terhadap PAD, diantaranya adalah Produk Domestik Bruto (PDB). Mesra (2017) menyatakan bahwa PDRB adalah salah satu variabel makro ekonomi yang biasanya digunakan sebagai ukuran mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Adapun pada wilayah provinsi atau Kabupaten/Kota, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara teori, maka PDRB merupakan bagian dari PDB. Hal ini menyebabkan perubahan PDRB akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya. Besarnya PDRB berdasarkan harga konstan tahun 2010 provinsi di Pulau Jawa dapat dideskripsikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1
 Nilai PDRB Provinsi di Pulau Jawa Berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010
 Tahun 2013 – 2017

Provinsi	PDRB (Triliun Rupiah)				
	2013	2014	2015	2016	2017
DKI Jakarta	1.296,69	1.373,39	1.454,56	1.540,08	1.635,86
Banten	331,10	349,35	368,38	387,82	409,96
Jawa Barat	1.093,54	1.149,22	1.207,23	1.275,53	1.342,95
Jawa Tengah	726,66	764,96	806,77	849,31	894,05
DI Yogyakarta	75,63	79,54	83,47	87,69	92,30
Jawa Timur	1.192,79	1.262,68	1.331,38	1.405,56	1.482,15

Sumber: BPS (2018)

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa besarnya PDRB Provinsi Jawa Tengah menempati posisi keempat diantara provinsi di Pulau Jawa. Juliansyah & Sulkadria (2018) menyatakan bahwa PDRB memberikan dampak langsung pada perolehan pendapatan daerah. PDRB merupakan fungsi dari PAD. Peningkatan PDRB akan menambah penerimaan pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk membiayai program-program pemerintah atau pembangunan sarana dan prasarana, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitasnya. Pengaruh PDRB terhadap PAD diantaranya juga dibuktikan oleh penelitian Mesra (2017); Lestari (2016); dan Batik (2013).

Faktor lain yang berpengaruh terhadap PAD adalah investasi swasta. Lestari (2016) menyatakan bahwa investasi swasta adalah realisasi penanaman modal swasta baik asing maupun dalam negeri. Semakin banyak perusahaan asing baik swasta maupun dalam negeri yang menginvestasikan uangnya di Jawa tengah maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan meningkat. Hal ini disebabkan semakin banyaknya modal yang masuk ke kas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengaruh investasi terhadap PAD diantaranya dibuktikan oleh penelitian Ifrizal, Darwanis, & Sulaiman (2014) dan Batik (2013).

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan bahwa pada tahun 2018, sebagian besar investasi berada di Pulau Jawa. Separuh investasi di Indonesia terkonsentrasi di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah (Thomas, 2019). Jumlah investasi tertinggi di Jawa Barat

sejumlah Rp37,3 triliun, diikuti DKI Jakarta sejumlah Rp24,7 triliun, Jawa Tengah sejumlah Rp21,4 triliun, Jawa Timur sejumlah Rp12,6 triliun, dan Banten sejumlah Rp12,5 triliun (Wicaksono, 2019). Apabila melihat data tersebut, maka investasi di Jawa Tengah merupakan terbesar nomor tiga di Pulau Jawa.

Pajak daerah juga berkontribusi positif terhadap PAD. Pada Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Pajak daerah dan retribusi daerah adalah dua komponen penting yang berkontribusi terhadap penerimaan PAD. Tingginya pencapaian penerimaan pajak daerah, maka berpengaruh terhadap semakin tingginya pencapaian penerimaan PAD dalam struktur keuangan daerah (Ramadhan, 2019). Pengaruh pajak daerah terhadap PAD juga dibuktikan oleh penelitian Mariyanto (2015).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana PDRB berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah ?

2. Bagaimana investasi berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah ?
3. Bagaimana pajak daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah ?
4. Bagaimana PDRB, investasi, dan pajak daerah secara serentak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh PDRB terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah.
2. Pengaruh investasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah.
3. Pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah.
4. Pengaruh PDRB, investasi, dan pajak daerah secara serentak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian dapat menjadi sumber referensi dan pengetahuan tentang pendapatan asli daerah (PAD) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi mengenai faktor yang mempengaruhi PAD sehingga dapat menjadi acuan dalam penentuan kebijakan untuk meningkatkan PAD.

- b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan acuan dalam melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang berpengaruh terhadap PAD.